



## Implementasi Kebijakan Program Cetak Sawah sebagai Upaya Pengembangan Lahan Pertanian Baru dan Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Muhammad Azhar<sup>1\*)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2)</sup>, Aris Sunarya<sup>3)</sup>, Eny Haryati<sup>4)</sup>

<sup>1) 2) 3) 4)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis : [ika.devy@unitomo.ac.id](mailto:ika.devy@unitomo.ac.id)

**Abstract.** *The implementation of the Rice Field Expansion Program as an effort to develop new agricultural land and achieve food sovereignty in Tanah Laut Regency, South Kalimantan, aims to optimize the use of agricultural land to support food security. This program was carried out as a response to the need for increased food production, particularly rice, to reduce dependency on imports and strengthen the national food system. This study analyzes various factors influencing the success of the rice field expansion program in Tanah Laut Regency, including planning, implementation, and challenges faced in developing new agricultural land. A case study method with a qualitative approach was used through in-depth interviews with relevant stakeholders, such as local government, farmers, and other related agencies. The results show that the program has a positive impact on increasing the area of productive agricultural land, but still faces challenges related to water availability, market access, and farmers' awareness in adopting new agricultural technologies. Therefore, improvements in coordination among stakeholders and the enhancement of supporting facilities are needed for the program to achieve its main goal, which is food sovereignty at the regional level.*

**Keywords:** *Policy implementation, rice field expansion, food sovereignty.*

**Abstrak.** Implementasi Kebijakan Program Cetak Sawah sebagai Upaya Pengembangan Lahan Pertanian Baru dan Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Program ini dilaksanakan sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan produksi pangan, khususnya beras, guna mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat sistem pangan nasional. Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program cetak sawah di Kabupaten Tanah Laut, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan lahan baru untuk pertanian. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, petani, dan instansi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah lahan pertanian yang produktif, namun masih menghadapi kendala terkait dengan ketersediaan air, akses pasar, serta kesadaran petani dalam mengadopsi teknologi pertanian baru. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam koordinasi antar pihak dan peningkatan fasilitas pendukung agar program ini dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu kedaulatan pangan di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, cetak sawah, kedaulatan pangan.

### 1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan kestabilan nasional. Dalam konteks ini, sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan seperti padi, memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan produksi pangan nasional, salah satunya adalah program cetak sawah sebagai bagian dari strategi perluasan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional (Siregar & Nugroho, 2018).

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi tugas penting kementerian pertanian. Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan terbesar. Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah “ kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan”. Dengan demikian suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.

Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis itu antara lain sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB (produk domestik bruto), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan dan penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor lainnya. Sektor pertanian juga merupakan sektor utama perekonomian daerah yang memperkuat sistem ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi, budaya dan kelembagaan lokal. Selain itu juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian upaya penurunan emisi gas rumah kaca (Irawan 2005; Kementan 2014)

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Mandiri Pangan. Salah satu kebijakan dalam upaya keberlangsungan ketahanan pangan adalah program cetak sawah.

Program cetak sawah telah diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kalimantan, yang dikenal memiliki potensi lahan cukup luas namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan menjadi salah satu sasaran program cetak sawah mengingat masih banyaknya lahan tidur dan semak belukar yang berpotensi dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Pelaksanaan program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produksi padi lokal,

tetapi juga mendorong kemandirian pangan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat (Yusdja et al., 2017).

Untuk mendukung swasembada pangan nasional, ditargetkan cetak sawah rakyat ini setidaknya dua hingga tiga kali panen dalam satu tahun. Mengingat potensi alam yang subur, keberadaan lahan-lahan potensial dan ketersediaan air yang melimpah diharapkan dapat mendukung terwujudnya percepatan swasembada pangan nasional. Hingga saat ini, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) prioritas I di Kabupaten Tanah laut yang berada di desa Bati Bati mencakup land clearing seluas  $\pm$  2.100 meter persegi serta pembuatan tanggul sepanjang 4.800 meter persegi. Langkah ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk mendukung swasembada pangan nasional, dengan potensi lahan di Kalsel yang mencapai total 195.664 hektare.

Berawal pada tahun 2023, Kalimantan menghadapi tantangan serius terkait ketidakcukupan konsumsi pangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Kalimantan memiliki prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) yang melebihi rata-rata nasional sebesar 8,53%. Kalimantan Utara mencatat angka tertinggi dengan 15,92%, diikuti oleh Kalimantan Barat sebesar 15,03%, dan Kalimantan Timur sebesar 9,2%. Sementara itu, Kalimantan Selatan memiliki angka yang lebih rendah, yaitu 4,48%, namun tetap menunjukkan adanya kerawanan pangan di beberapa wilayah.

**Tabel 1.** Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kalimantan (2023)

| No | Provinsi           | Prevelensi |
|----|--------------------|------------|
| 1  | Kalimantan Selatan | 4,48 %     |
| 2  | Kalimantan Timur   | 9,20 %     |
| 3  | Kalimantan Utara   | 15,92 %    |
| 4  | Kalimantan Barat   | 15,03 %    |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan Program Cetak Sawah Rakyat yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional dengan memanfaatkan lahan kurang produktif. Program ini melibatkan peningkatan kualitas lahan, pembangunan infrastruktur pertanian, dan pencetakan sawah baru. Kalimantan Selatan menjadi salah satu fokus utama program ini, dengan target pengembangan lahan sawah hingga 500.000 hektar secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Implementasi program ini juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan keberhasilan. Dengan adanya program cetak sawah, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan lokal, memperbaiki kesejahteraan petani, dan mengurangi angka ketidakcukupan konsumsi pangan di Kalimantan. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern dan efisiensi dalam produksi.

Meskipun demikian, implementasi program cetak sawah di Tanah Laut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan teknis seperti kualitas tanah dan irigasi, hingga persoalan sosial-ekonomi masyarakat petani, termasuk masalah kepemilikan lahan dan partisipasi aktif petani dalam pengelolaan lahan baru. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan program ini, terutama karena banyak lahan yang dialihfungsikan berasal dari lahan gambut atau kawasan hutan sekunder (Hidayat et al., 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan cetak sawah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program ini memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan program cetak sawah di Kabupaten Tanah Laut, baik dari aspek perencanaan, implementasi, hingga dampak sosial dan ekonominya. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah daerah, hambatan yang dihadapi, serta sejauh mana program ini mampu mendukung ketahanan pangan lokal. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga mengeksplorasi peran aktor-aktor kunci seperti Dinas Pertanian, kelompok tani, dan masyarakat penerima manfaat dalam proses implementasi kebijakan.

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih adaptif dan berbasis pada potensi lokal. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan nasional dalam upaya perluasan lahan pertanian secara berkelanjutan, terutama di wilayah luar Jawa yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda (Putra & Indrawati, 2020).

## **2. LANDASAN TEORI**

Implementasi dapat dihubungkan pada kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila dilakukan implementasi akan kebijakan. Menurut Oktasari, (2019:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi ialah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak.

Implementasi menurut Mulyadi, (2019:45) ialah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Meter dan Horn dalam Ratri (2019:4), menyatakan implementasi kebijakan publik selaku tindakan individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan. Dimana berarti proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum peraturan ditetapkan serta dana disediakan. Implementasi merupakan proses terkait kebijakan dan program organisasi yang berkaitan dengan institusi negara untuk mendukung pelaksanaan program. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme sistem, untuk mencapai tujuan kegiatan (Namonto, 2018).

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, yang menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Proses ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga atau aktor pelaksana dengan memperhatikan faktor-faktor seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial-politik.

Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi adalah kesesuaian antara isi kebijakan dan konteks tempat kebijakan tersebut dijalankan. Lipsky (1980) melalui konsep “street-level bureaucracy” menekankan pentingnya peran pelaksana di tingkat bawah, seperti petugas lapangan atau birokrat tingkat lokal, yang seringkali memiliki diskresi dalam menjalankan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan berjalan sesuai dengan rencana karena adanya interpretasi dan adaptasi oleh para pelaksana di lapangan.

Model implementasi kebijakan juga beragam. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah model top-down dan bottom-up. Model top-down menekankan kendali pusat dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan model bottom-up lebih menekankan pada fleksibilitas dan inisiatif lokal dalam menerjemahkan kebijakan sesuai kebutuhan daerah. Grindle (1980) menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam model “implementability”, yang menggarisbawahi pentingnya isi kebijakan dan lingkungan implementasi sebagai dua aspek utama keberhasilan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori implementasi kebijakan menjadi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk merancang strategi

implementasi yang adaptif dan partisipatif, sehingga kebijakan publik dapat berdampak nyata bagi masyarakat.

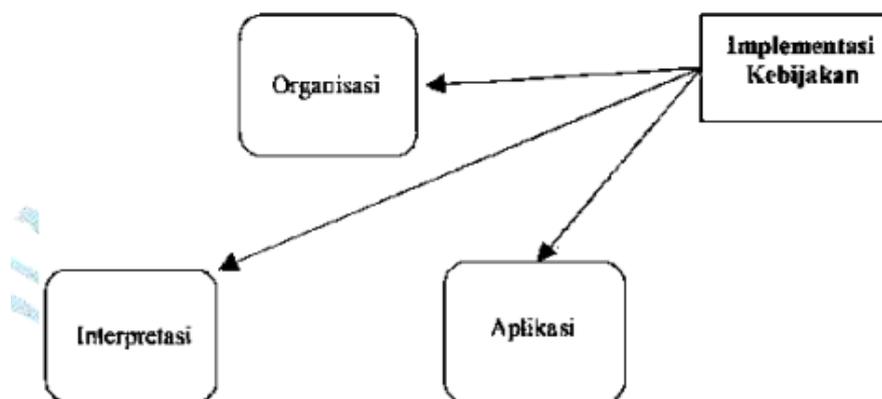
### **Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones**

Charles O. Jones (1996:166) menyatakan implementasi kebijakan, ialah rangkaian aktivitas untuk melaksanakan program untuk menimbulkan akibat tertentu. Menurut Charles O. Jones dalam Abidin (2019; 199) menyebutkan dalam implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat 3 macam aktivitas:

1. Organisasi: Organisasi merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil.
2. Interpretasi atau Pemahaman: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Sejalan dengan ini Abidin (2002;199) mengemukakan juga tentang keberhasilan implementasi kebijakan dari pendekatan procedural, yang berupa langkah- langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan..

Berbagai uraian tentang implementasi program dalam tulisan ini, berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan menggunakan tindakan-tindakan yang nyata serta sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Berikut gambar model implementasi kebijakan public menurut Charles O. Jones antara lain:



**Gambar 1**

### **Model Implementasi Kebijakan Publik Charles O. Jones**

Sumber: Kadji (2016)

Menurut Aziz et al (2022) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha transformasi keputusan menjadi tindakan operasional untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan keputusan kebijakan. Menurut Eminue dalam Kristian, (2023), implementasi kebijakan publik ialah proses perubahan masukan manusia dan material menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan public berupaya mengubah mandat menjadi kenyataan. Implementasi kebijakan tidak dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan program cetak sawah sebagai upaya pengembangan lahan pertanian baru di Kabupaten Tanah Laut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas sosial dan kebijakan publik dari perspektif para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta mengungkap dinamika yang terjadi di lapangan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program cetak sawah. Informan kunci meliputi aparat Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, petugas lapangan atau penyuluh pertanian, kepala desa, serta kelompok tani yang menerima manfaat program. Selain itu, informan tambahan dapat ditentukan melalui teknik snowball apabila diperlukan untuk memperkaya data dan memperluas perspektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar data yang diperoleh bersifat terbuka dan fleksibel. Observasi dilakukan terhadap kondisi fisik lahan cetak sawah, aktivitas pertanian, serta proses interaksi antara pelaksana program dan petani. Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan program, dan data pendukung lainnya dari instansi terkait.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Langkah-langkah analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Validitas temuan juga diperkuat melalui diskusi dengan informan serta pengecekan kembali informasi yang diperoleh secara silang antar narasumber.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan cetak sawah di wilayah studi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang sangat penting dan bersifat urusan wajib. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi.

Negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan. Arah kebijakan ketahanan pangan. Strategi ketahanan pangan tentu harus berbasis pada Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional yang tidak dapat dilepaskan dari amanat yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat, yaitu; “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Berdasarkan amanat pada Pasal 33 UUD 1945 (setelah amandemen ke empat), maka UU No 41 tahun 2009, PP No 68 tahun 2002 dan PP no 11 tahun 2011, menyatakan bahwa Kebijakan ketahanan pangan nasional tidak hanya diarahkan untuk mencapai ketersediaan pangan, tetapi juga diarahkan untuk mencapai keterjangkauan, kemandirian, kedaulatan, kualitas dan keamanan pangan. Bahkan dalam RPJMN 2009-2014 dinyatakan bahwa prioritas ketahanan pangan nasional untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah untuk :

- (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan,
- (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta

(3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan

Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka sasaran utama dari strategi ketahanan pangan nasional adalah tercapainya ketersediaan, kemandirian, kedaulatan, daya saing serta aksesibilitas penduduk terhadap pangan dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera dan ketahanan nasional. Upaya peningkatan ketersediaan, kemandirian dan daya saing ini (SwaSembada Pangan) ini harus telah menjadi komitmen nasional. Strategi ketahanan pangan nasional yang menitik beratkan pada ketersediaan, kemandirian, akses penduduk dan kedaulatan pangan mambawa konsekuensi pada strategi pembangunan nasional yang berbasis pada resource and knowledge based strategy dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam arti luas. Prioritas tidak hanya diberikan pada on farm tetapi juga off farm, dalam rangka peningkatan nilai tambah dari produk- produk pangan nasional, sehingga daya saing produk pangan nasional akan meningkat.

Strategi Ketahanan Pangan Nasional hendaknya tidak hanya diarahkan untuk untuk mencapai kecukupan akan pangan, tetapi juga lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan (swasembada pangan) serta peningkatan daya saing produk-produk pangan nasional dalam rangka Ketahanan Nasional. Kita mengetahui bahwa pangan adalah komoditi yang sangat strategis bagi ketahanan nasional. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan indikator kunci bagi stabilitas nasional. Pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia, baik pada tahun 1965 maupun 1998 pemicu utamanya adalah kenaikan harga pangan yang sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan distrust masyarakat terhadap Pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Pemerintah. Komoditi pangan di samping strategis bagi stabilitas nasional, juga merupakan komoditi yang sangat penting bagi upaya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia di pasaran global. Oleh karena itu strategi ketahanan pangan nasional yang berorientasi pada swasembada harus diarahkan juga untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk-produk pangan nasional, sehingga mampu berkompetisi di pasaran dunia. Saat ini produk-produk pangan Indonesia tidak hanya kalah bersaing di pasaran dunia, tetapi di pasar domestik pun kita cenderung kalah untuk berkompetisi. Kondisi ini ternyata membawa implikasi pada masih rendahnya daya saing ekonomi nasional di pasaran dunia.

Implementasi kebijakan Program Cetak Sawah di Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperluas lahan pertanian produktif, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pertanian namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah Tanah Laut dalam mengidentifikasi lahan tidur atau lahan

nonproduktif yang dapat dikonversi menjadi sawah. Tahapan awal kebijakan ini mencakup pemetaan lahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor termasuk dengan TNI sebagai pelaksana teknis di lapangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Anwar, sebagai berikut:

*“Dari sisi ketahanan pangan, program ini potensial mengurangi ketergantungan beras dari luar pulau. Tapi harus hati-hati, karena pembukaan lahan di Kalimantan sering melibatkan ekosistem gambut yang rentan rusak jika tidak ditangani dengan benar. Perlu pendekatan agroekologi dan teknologi adaptif agar produksi meningkat tanpa merusak lingkungan. Pemerintah juga perlu fokus pada keberlanjutan, tidak hanya cetak lahan, tapi juga pemberdayaan petani dan pasar yang adil.”*

Implementasi kebijakan Program Cetak Sawah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam perluasan lahan pertanian baru. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat, sejak dimulainya program ini, telah dicetak lebih dari 1.200 hektar lahan sawah baru yang sebelumnya berupa lahan tidur atau semak belukar. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan nasional. Selain itu Cetak sawah di Kalimantan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membuka atau memperluas lahan pertanian, khususnya lahan sawah, di wilayah Kalimantan yang masih memiliki cadangan lahan cukup luas, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Sujono, sebagai berikut:

*“Program cetak sawah ini merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di Kalimantan yang masih memiliki lahan tidur cukup luas. Sejak tahun 2021, kami telah mencetak sekitar 1.200 hektare sawah baru, bekerja sama dengan TNI dan kelompok tani. Namun, tantangan utama ada pada irigasi dan konversi lahan gambut yang memerlukan penyesuaian teknologi pertanian. Kami juga masih mendorong petani lokal untuk aktif dan meningkatkan kapasitasnya.”*

Di Kalimantan, program cetak sawah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memanfaatkan potensi lahan luas yang masih belum tergarap. Proyek ini mendapat perhatian besar terutama sejak digagas sebagai bagian dari program food estate di Kalimantan Tengah dan beberapa wilayah lain, di mana lahan-lahan eks-transmigrasi dan lahan tidur dicoba diolah kembali menjadi produktif.

Dalam konteks Kalimantan, pemilihan lahan menjadi hal yang sangat krusial, karena sebagian besar wilayahnya merupakan tanah gambut dan hutan tropis. Tanah gambut memiliki karakteristik unik—kaya bahan organik, tetapi sangat asam, mudah terbakar, dan memiliki daya dukung yang rendah terhadap bangunan atau tanaman berat. Oleh karena itu, pemanfaatan

tanah gambut untuk cetak sawah memerlukan teknologi dan manajemen air yang cermat, serta pengolahan tanah yang intensif. Jika tidak ditangani dengan tepat, tanah gambut dapat cepat mengalami kerusakan ekologis yang berdampak jangka panjang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Roni, sebagai berikut:

*“Awalnya kami ragu karena lahan yang dipakai sebagian besar adalah lahan rawa dan semak belukar. Tapi setelah didampingi penyuluh pertanian dan dibantu alat berat, hasilnya cukup baik. Tahun pertama panen belum maksimal, tapi tahun kedua sudah meningkat. Tantangannya masih di saluran air dan pupuk yang kadang terlambat datang. Kami berharap pendampingan terus dilakukan dan harga gabah juga dijaga agar petani tidak rugi.”*

Sementara itu, hutan di Kalimantan, terutama hutan primer dan sekunder, menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan berfungsi penting sebagai penyangga ekosistem. Pembukaan lahan sawah yang dilakukan dengan menggunduli hutan menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan, termasuk hilangnya habitat satwa liar, terganggunya siklus air, hingga peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, konversi hutan menjadi sawah harus dilakukan dengan seleksi yang sangat ketat, menghindari kawasan lindung dan hutan primer, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Proses pemilihan lahan untuk cetak sawah biasanya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti aksesibilitas, kedalaman gambut, tutupan vegetasi, ketersediaan air, dan potensi konflik sosial. Idealnya, lahan yang dipilih adalah lahan non-produktif yang tidak berada di kawasan konservasi atau hutan lindung, serta memiliki kedalaman gambut kurang dari satu meter agar lebih mudah diolah. Pemerintah juga dianjurkan untuk melibatkan masyarakat lokal, terutama komunitas adat, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar proyek tidak menimbulkan konflik sosial dan berdampak negatif pada mata pencaharian mereka.

Dengan demikian, cetak sawah di Kalimantan bukan hanya sekadar soal membuka lahan, tetapi juga soal pengelolaan sumber daya alam yang kompleks. Jika dilakukan tanpa kajian yang matang dan pengelolaan yang bijaksana, proyek cetak sawah bisa gagal secara teknis dan ekologis. Namun, jika dirancang dengan prinsip keberlanjutan, pendekatan ilmiah, serta melibatkan masyarakat lokal, cetak sawah berpotensi besar mendukung ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan, khususnya di wilayah luar Jawa.

Program ini merupakan bagian dari strategi swasembada pangan dengan cara mengubah hutan, semak belukar, atau lahan gambut menjadi areal persawahan produktif. Namun, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis di lapangan, seperti kondisi topografi yang kurang mendukung serta keterbatasan alat dan tenaga kerja pertanian.

Secara kelembagaan, implementasi program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani. Koordinasi antar pemangku kepentingan dinilai cukup baik, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan alat dan bibit yang berdampak pada penundaan masa tanam. Partisipasi kelompok tani juga bervariasi, tergantung pada kesiapan dan pemahaman mereka terhadap program. Dalam beberapa kasus, sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan sebagian petani belum sepenuhnya memahami tata kelola dan manfaat jangka panjang dari lahan cetak sawah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Anwar, sebagai berikut:

*“Program cetak sawah mulai masuk ke desa kami sekitar tahun 2021, waktu itu dari Dinas Pertanian provinsi yang datang bersama TNI. Lahan yang dibuka adalah lahan rawa yang sebelumnya tidak tergarap. Kami dibantu dengan alat berat dan juga pelatihan teknik pengolahan tanah rawa menjadi sawah”*

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan kerja sama antara berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian, TNI, dan pemerintah daerah setempat. TNI, khususnya, berperan aktif dalam pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan akses jalan. Kementerian Pertanian menyediakan dukungan teknis, benih, pupuk, serta pendampingan kepada petani, sementara pemerintah daerah bertugas memastikan legalitas lahan dan kesiapan masyarakat lokal dalam mengelola sawah baru tersebut.

Pada tahap implementasi, program ini dijalankan melalui mekanisme padat karya yang melibatkan masyarakat lokal, dengan harapan menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap lahan yang dicetak. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut bertugas memfasilitasi proses pembukaan lahan, irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan), benih, dan pupuk. Selain itu, pendampingan teknis dan pelatihan juga diberikan kepada petani baru agar mereka mampu mengelola sawah dengan produktif dan berkelanjutan.

Saat ini, program Cetak Sawah Prioritas Satu di Desa Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, mencakup land clearing seluas 2.100 meter persegi dan pembuatan tanggul sepanjang 4.800 meter persegi. Langkah ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk mendukung swasembada pangan nasional, dengan potensi lahan di Kalsel yang mencapai total 195.664 hektare. Proyek tersebut dikelola menggunakan metode rawa lebak dengan melibatkan pembuatan saluran irigasi dan tanggul guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

*Implementasi Kebijakan Program Cetak Sawah sebagai Upaya Pengembangan Lahan Pertanian Baru* menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi belum tergarap optimal.

Namun, implementasi program ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah teknis pengairan di beberapa lokasi, status kepemilikan lahan yang belum jelas, serta rendahnya partisipasi petani akibat minimnya pemahaman terhadap program. Di beberapa titik, hasil cetak sawah tidak langsung dapat ditanami karena kondisi tanah belum siap secara agronomis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi lahan produktif. Kurangnya evaluasi dan monitoring berkala juga menyebabkan tidak semua target luasan lahan yang dicetak dapat terealisasi secara efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Tantangan utama itu air. Karena ini lahan rawa, air sering berlebih atau kadang sulit keluar. Saluran irigasi awalnya belum optimal. Selain itu, banyak petani belum terbiasa menanam padi di tanah jenis ini, jadi perlu belajar lagi. Ada juga kendala pupuk dan benih yang kadang datang terlambat.”*

Dari aspek keberlanjutan, program ini belum sepenuhnya berhasil dalam mempertahankan produktivitas lahan yang telah dicetak. Beberapa lahan yang sudah dibuka belum dikelola secara intensif karena keterbatasan akses irigasi dan belum optimalnya pendampingan teknis dari penyuluh pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa cetak sawah bukan hanya soal membuka lahan baru, tetapi juga memerlukan dukungan berkelanjutan dalam hal infrastruktur, teknologi, dan kapasitas petani. Tanpa upaya pendampingan yang konsisten, dikhawatirkan lahan baru tersebut akan kembali tidak produktif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*Kami berharap pemerintah terus mendampingi, jangan hanya buka lahan saja lalu ditinggal. Kami juga butuh pelatihan, akses ke pasar, dan dukungan alat pertanian. Kalau itu semua jalan, petani akan semangat, dan ketahanan pangan bisa benar-benar terwujud, bukan hanya slogan.*

Secara keseluruhan, kebijakan cetak sawah di Kabupaten Tanah Laut memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan lahan pertanian baru. Namun, agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan, perlu adanya perbaikan dalam perencanaan teknis, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan pendanaan jangka panjang. Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif dalam memfasilitasi kebutuhan petani pasca-cetak sawah, agar

tujuan peningkatan produksi pangan benar-benar tercapai dan berdampak pada kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Alhamdulillah, dua tahun terakhir hasilnya makin baik. Tahun pertama kami panen cuma sekitar 3 ton per hektare. Tapi setelah dapat pendampingan dan perbaikan irigasi, tahun ini sudah tembus 5 ton lebih per hektare. Itu sangat membantu pendapatan petani di sini”*

Program cetak sawah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan jumlah panen di berbagai daerah. Dengan memperluas lahan pertanian melalui pencetakan sawah baru, petani memiliki lebih banyak ruang untuk menanam padi secara intensif. Hal ini secara langsung meningkatkan volume produksi gabah, terutama di wilayah yang sebelumnya tidak tergarap atau terabaikan. Penambahan luas lahan tanam juga mendorong peningkatan frekuensi musim tanam per tahun, sehingga total jumlah panen dapat meningkat secara konsisten. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*Iya jelas. Dulu kami banyak beli beras dari luar, sekarang sudah bisa konsumsi hasil sendiri bahkan sebagian dijual ke pasar kecamatan. Harapan kami, kalau program ini terus berlanjut dan lebih banyak petani ikut, desa kami bisa jadi lumbung padi di wilayah tengah Kalimantan.*

Lebih jauh, program cetak sawah juga menciptakan efek berantai dalam ketahanan pangan nasional. Dengan meningkatnya jumlah panen, kebutuhan beras dalam negeri dapat lebih mudah dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor. Surplus produksi dari program ini juga berpotensi menambah cadangan beras nasional dan memberi peluang ekspor ke negara lain. Dalam jangka panjang, kestabilan jumlah panen yang dihasilkan dari program cetak sawah akan memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

## **5. KESIMPULAN**

Program cetak sawah di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan strategis pemerintah dalam mengembangkan lahan pertanian baru guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian produktif melalui pembukaan areal baru yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan kelompok tani, dengan pendekatan kolaboratif.

Namun, dalam pelaksanaannya, program cetak sawah masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial, seperti keterbatasan infrastruktur irigasi, kesiapan petani dalam mengelola lahan baru, serta koordinasi antar-instansi yang belum optimal. Kendala tersebut berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan program, sehingga perlu adanya evaluasi secara menyeluruh serta peningkatan kapasitas petani dan dukungan sarana produksi yang memadai. Selain itu, aspek lingkungan juga harus diperhatikan agar pembukaan lahan tidak menimbulkan degradasi ekosistem.

Secara keseluruhan, kebijakan cetak sawah di Tanah Laut memiliki potensi besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan apabila didukung oleh perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat secara aktif, dan pengawasan yang berkelanjutan. Penguatan sinergi antar sektor dan pemberdayaan petani lokal menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas lahan baru serta menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, program ini dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan pertanian nasional yang mandiri dan berdaya saing.

## REFERENSI

- Aziz, L. O. Z. F., Bahtiar, & Mustafa, L. O. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bau-Bau [Implementation of tourism development policies in increasing regional original income (PAD) in Bau-Bau City]. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 46–53.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hidayat, A. R., Safitri, R., & Hamdani, M. (2021). Kajian lingkungan program cetak sawah di Kalimantan: Antara produktivitas dan konservasi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 133–142.
- Irawan, B. (2005). Konversi lahan sawah menimbulkan dampak negatif bagi ketahanan pangan dan lingkungan. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 27(6), 8–10.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Mulyadi, D. (2019). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta.

- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Oktasari, P. P. (2019). Implementasi model pembelajaran Team Game Tournament (TGT) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. *Jurnal Intersections*, 4(2), 8–16. <https://doi.org/10.47200/intersections.v5i1.514>
- Putra, R. A., & Indrawati, R. (2020). Kebijakan ketahanan pangan di kawasan perbatasan: Studi di Kalimantan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 89–102.
- Siregar, H., & Nugroho, D. A. (2018). Evaluasi program cetak sawah baru: Kajian terhadap keberhasilan dan permasalahannya. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 101–115.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yusdja, Y., Suhartini, S., & Pranadji, T. (2017). Program perluasan areal tanam padi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 35(1), 1–15.